

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Botoh memiliki posisi yang sangat menentukan dinamika praktik *vote buying* Pilkada Kudus 2024. Menjawab rumusan masalah pertama mengenai pola kerja Botoh, penelitian ini menemukan bahwa praktik *vote buying* dijalankan melalui tahapan yang relatif sistematis. Kerja Botoh dimulai dari proses membaca lapangan, bukan dari pembagian uang. Melalui survei tradisional dan pemetaan sosial, Botoh mengidentifikasi kecenderungan pemilih, isu-isu sosial yang memengaruhi pilihan politik, serta wilayah yang dianggap strategis atau rawan. Proses ini menjadi dasar bagi Botoh dalam menentukan waktu keterlibatan, skala investasi, dan bentuk intervensi yang dilakukan. Pola kerja Botoh juga ditandai oleh koordinasi yang bersifat senyap. Antar tim lapangan bekerja tanpa saling mengetahui detail aktivitas masing-masing, sementara Botoh berperan sebagai simpul yang menerima laporan dan mengatur arah kerja. Pola ini menunjukkan bahwa efektivitas kerja Botoh tidak bergantung pada keterbukaan organisasi, melainkan pada kemampuan menjaga kerahasiaan dan kepercayaan dalam jaringan. Dengan cara tersebut, Botoh dapat mengurangi risiko konflik internal, kebocoran informasi, dan gangguan dari pihak luar. Distribusi insentif dalam praktik *vote buying* juga mengikuti pola yang terukur. Botoh tidak membagikan uang secara merata atau serampangan, melainkan berdasarkan prioritas wilayah dan kategori pemilih. Waktu, bentuk, dan saluran distribusi disesuaikan dengan kondisi sosial setempat. Dalam konteks ini, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi menjadi bagian dari relasi sosial yang telah dibangun sebelumnya. Hal ini memperlihatkan bahwa politik uang dalam praktik

Botoh tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja bersama jaringan sosial dan relasi kepercayaan. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa praktik *vote buying* yang melibatkan Botoh dijalankan melalui kalkulasi rasional oleh seluruh aktor yang terlibat. Botoh mempertimbangkan risiko dan peluang sebelum menanamkan modal politik, kandidat mempertimbangkan peluang kemenangan di tengah keterbatasan institusi formal, sementara pemilih membuat pilihan dalam konteks sosial-ekonomi dan jaringan sosial yang mereka hadapi. Rasionalitas ini tidak selalu ideal dalam kerangka demokrasi normatif, tetapi masuk akal dalam realitas politik lokal yang dihadapi para aktor.

Sementara itu, peran Botoh ialah sebagai broker politik dalam arti yang substantif. Botoh tidak hanya memfasilitasi pertukaran antara kandidat dan pemilih, tetapi mengatur bagaimana pertukaran tersebut berlangsung, siapa yang terlibat, dan sejauh mana masing-masing aktor mengetahui keseluruhan proses. Dengan cara ini, Botoh membangun posisi tawar yang kuat dan relatif tidak tergantikan dalam jaringan kemenangan. Peran Botoh sebagai broker terlihat jelas dari cara ia mengelola jaringan kerja. Botoh tidak membentuk struktur organisasi yang terbuka dan terpusat, melainkan mempertahankan jaringan yang terfragmentasi. Pemisahan antar tim lapangan, kerja paralel, dan pembatasan informasi antar aktor membuat setiap simpul jaringan hanya memahami sebagian kecil dari proses kemenangan. Dalam situasi tersebut, Botoh menjadi satu-satunya aktor yang memiliki gambaran menyeluruh mengenai strategi, peta lapangan, dan dinamika jaringan. Kekuasaan Botoh tidak lahir dari kemampuan memberi perintah secara langsung, melainkan dari kemampuannya mengelola relasi dan ketergantungan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa Botoh juga berperan sebagai pengelola ketergantungan politik

antara dirinya dan kandidat. Relasi kerja antara Botoh dan kandidat dibangun sejak awal melalui perjanjian yang bersifat spekulatif, seperti skema “menang dibayar dua kali lipat, kalah hangus”. Skema ini tidak hanya mengatur persoalan finansial, tetapi menciptakan ikatan politik yang berlanjut setelah pemilihan selesai. Kandidat yang memenangkan kontestasi melalui kerja Botoh tidak sepenuhnya berdiri sebagai aktor otonom, karena kemenangan tersebut sejak awal bergantung pada jaringan, modal, dan strategi yang dikendalikan Botoh.

Melalui pembacaan terhadap pola kerja dan peran Botoh, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *vote buying* pada Pilkada Kudus 2024 tidak dapat dilepaskan dari cara politik lokal dijalankan sehari-hari. Botoh hadir bukan semata karena dorongan pragmatis individual, tetapi karena adanya ruang struktural yang belum sepenuhnya diisi oleh institusi politik formal. Selama ruang tersebut tetap ada, praktik brokerage politik akan terus menemukan bentuk dan jalur kerjanya sendiri dalam setiap kontestasi elektoral.

4.2 Implikasi Penelitian

Temuan penelitian mengenai pola kerja dan peran Botoh dalam praktik *vote buying* Pilkada Kudus 2024 tidak hanya memberikan gambaran empiris mengenai dinamika politik lokal, tetapi juga menghadirkan sejumlah implikasi penting, baik bagi pengembangan kajian Ilmu Pemerintahan maupun bagi praktik penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal. Implikasi ini tidak dimaksudkan sebagai rekomendasi normatif yang bersifat teknokratis semata, melainkan sebagai refleksi atas konsekuensi struktural dari keberadaan Botoh sebagai aktor politik informal.

4.2.1 Implikasi Teoretis

Dari sisi teoretis, penelitian ini menegaskan relevansi **Brokerage Theory** oleh Katherine Stovel (2011) sebagai kerangka analisis utama dalam membaca praktik *vote buying* di tingkat lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya menempatkan *vote buying* sebagai bentuk politik uang atau perilaku menyimpang individu tidak cukup untuk menjelaskan kompleksitas praktik yang terjadi di lapangan. Dengan menempatkan Botoh sebagai broker politik, penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik *vote buying* bekerja melalui struktur relasi, jaringan, dan ketergantungan yang terorganisasi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa teori klientelisme dan patronase, sebagaimana dikembangkan oleh Aspinall, Sukmajati, dan James C. Scott, lebih tepat dipahami sebagai mekanisme relasional di dalam sistem brokerage, bukan sebagai kerangka utama yang berdiri sendiri. Relasi klientelistis dalam praktik Botoh tidak berlangsung secara langsung antara kandidat dan pemilih, melainkan dimediasi oleh Botoh sebagai aktor penghubung. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian klientelisme dengan menunjukkan bagaimana relasi tersebut dikelola dan dikendalikan oleh broker politik informal.

Implikasi teoretis lainnya terlihat pada penggunaan teori politik uang ala James S. Coleman. Penelitian ini menunjukkan bahwa uang dalam praktik *vote buying* tidak berfungsi sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen yang dikelola secara strategis dalam jaringan brokerage. Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa politik uang tetap efektif meskipun regulasi pemilu semakin ketat, karena yang dikendalikan bukan hanya distribusi uang, tetapi juga alur relasi dan informasi yang melingkupinya.

Selain itu, temuan penelitian ini memperkuat argumen teori jaringan sosial Granovetter dan McClurg dalam konteks politik lokal Indonesia. Jaringan sosial tidak hanya berfungsi sebagai latar sosial, tetapi sebagai infrastruktur utama yang menopang kerja brokerage Botoh. Survei tradisional, koordinasi senyap, dan kerja paralel antar tim merupakan praktik yang hanya dapat dipahami ketika jaringan sosial ditempatkan sebagai elemen sentral dalam analisis politik elektoral.

Penggunaan perspektif *rational choice*, khususnya melalui pemikiran Catherine H. Zuckert, juga memberikan implikasi penting. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *vote buying* dijalankan melalui kalkulasi rasional para aktor dalam batasan struktur yang mereka hadapi. Rasionalitas ini tidak meniadakan dimensi normatif demokrasi, tetapi membantu menjelaskan mengapa praktik tersebut terus direproduksi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa botoh bukan sekadar aktor ‘bayangan’ dalam kontestasi politik lokal, melainkan bagian dari struktur kekuasaan yang secara empiris bekerja dan berpengaruh. Penegasan ini tidak dimaksudkan untuk menjustifikasi praktik politik uang, melainkan untuk menunjukkan bahwa dalam praktiknya, kekuasaan lokal dijalankan melalui kombinasi mekanisme formal dan relasi informal yang saling bertaut.

Kontribusi terhadap Ilmu Pemerintahan terletak pada dorongan untuk melihat demokrasi lokal secara lebih realistis dan komprehensif. Kajian pemerintahan tidak cukup berhenti pada desain institusi dan norma prosedural, tetapi perlu mengakui keberadaan aktor-aktor perantara yang secara faktual memengaruhi distribusi kekuasaan. Perspektif ini penting agar analisis terhadap

demokrasi lokal tidak bersifat naif atau parsial. Justru dengan memetakan secara kritis bagaimana aktor informal bekerja dalam struktur politik, Ilmu Pemerintahan dapat lebih tajam dalam mengevaluasi kualitas institusi, efektivitas regulasi, serta tantangan substantif yang dihadapi demokrasi di tingkat lokal.

4.2.2 Implikasi Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan gambaran bahwa upaya penanggulangan politik uang dan *vote buying* tidak dapat hanya difokuskan pada kandidat atau pemilih sebagai pelaku individual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Botoh sebagai broker politik informal merupakan simpul kunci dalam praktik *vote buying*. Tanpa memahami peran dan cara kerja Botoh, kebijakan pengawasan pemilu berisiko hanya menyentuh permukaan persoalan.

Bagi lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, penelitian ini mengindikasikan pentingnya pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis jaringan. Pengawasan yang hanya berorientasi pada pelanggaran administratif dan peristiwa pembagian uang secara kasat mata cenderung tidak efektif ketika praktik *vote buying* dijalankan melalui jaringan informal yang tertutup dan terfragmentasi. Pemahaman terhadap pola kerja Botoh dapat menjadi dasar untuk merancang strategi pengawasan yang lebih adaptif terhadap realitas politik lokal.

Implikasi praktis juga relevan bagi partai politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketergantungan kandidat pada Botoh muncul seiring dengan melemahnya fungsi partai dalam menjangkau pemilih secara langsung. Partai politik yang tidak memiliki jaringan sosial yang kuat di tingkat akar rumput

cenderung menyerahkan kerja pemenangan kepada aktor informal. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan fungsi kaderisasi, pendidikan politik, dan kerja basis oleh partai politik agar tidak sepenuhnya bergantung pada broker politik informal.

Bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan demokrasi lokal, penelitian ini mengingatkan bahwa praktik *vote buying* tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi dan relasi kekuasaan di tingkat lokal. Selama akses masyarakat terhadap kebijakan publik, kesejahteraan, dan representasi politik masih bersifat terbatas, praktik pertukaran politik berbasis uang dan jaringan akan tetap menemukan legitimasi sosialnya. Dengan demikian, penguatan demokrasi lokal tidak hanya soal penegakan hukum pemilu, tetapi juga soal memperluas akses dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan formal.

Implikasi praktis ini tidak dimaksudkan sebagai resep kebijakan yang bersifat instan, melainkan sebagai refleksi atas kebutuhan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam memahami dan menangani praktik *vote buying*. Dengan memahami Botoh sebagai bagian dari struktur politik lokal, upaya perbaikan demokrasi dapat diarahkan pada perubahan struktural, bukan sekadar penindakan kasus per kasus.

4.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran

Penelitian ini disusun dengan upaya untuk memahami praktik *vote buying* melalui pola kerja dan peran Botoh dalam Pilkada Kudus tahun 2024. Meskipun temuan penelitian memberikan gambaran yang relatif mendalam mengenai dinamika brokerage politik lokal, penelitian ini tetap memiliki sejumlah

keterbatasan yang perlu disadari secara terbuka sebagai bagian dari tanggung jawab akademik.

4.3.1 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pertama berkaitan dengan cakupan wilayah dan konteks penelitian. Penelitian ini berfokus pada satu daerah dan satu kontestasi elektoral, yaitu Pilkada Kudus tahun 2024. Fokus ini memungkinkan pendalaman analisis secara kontekstual, tetapi pada saat yang sama membatasi ruang generalisasi temuan. Praktik Botoh di Kudus memiliki karakteristik sosial, kultural, dan politik yang khas, sehingga temuan penelitian ini tidak serta-merta dapat diterapkan pada daerah lain tanpa mempertimbangkan perbedaan konteks lokal.

Keterbatasan kedua berkaitan dengan pemilihan subjek dan sudut pandang analisis. Penelitian ini secara sadar menempatkan botoh sebagai aktor utama untuk mengisi kekosongan kajian yang selama ini lebih banyak berfokus pada kandidat atau pemilih. Pilihan tersebut memberikan kesempatan eksplorasi yang lebih mendalam mengenai pola kerja, strategi distribusi, serta logika internal Botoh dan jaringannya. Namun, konsekuensinya adalah perspektif terkait dinamika rasionalitas pemilih, pertimbangan moral, tekanan sosial, maupun pengalaman subjektif pemilih dalam menghadapi tawaran transaksional menjadi kurang tergali dan lebih banyak terbaca melalui kacamata botoh dan jaringan pemenangan.

Keterbatasan ketiga berkaitan dengan karakter data kualitatif yang digunakan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aktor-aktor yang terlibat langsung dalam praktik *vote buying* dalam jaringan Botoh pada Pilkada Kudus tahun 2024. Meskipun pendekatan ini memungkinkan eksplorasi

makna dan logika kerja Botoh secara lebih kaya, data yang diperoleh tetap sangat bergantung pada ingatan dan sejauh mana informan bersedia untuk terbuka. Sebagaimana pada saat peneliti melakukan wawancara, hanya Botoh Oportunis yang dengan nyaman menjawab pertanyaan bahkan bercerita secara luas, sementara narasumber Botoh Klientelis, Tim Lapangan, Kepala Desa, serta Anggota Dewan cenderung tidak bercerita banyak, bahkan tidak bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan spesifik. Namun, tidak dapat dipungkiri, dalam konteks praktik politik yang bersifat informal dan tertutup seperti praktik jaringan Botoh, terdapat kemungkinan adanya seleksi informasi, penyederhanaan cerita, atau penekanan tertentu yang tidak dapat sepenuhnya dihindari.

Selain itu, penelitian ini belum secara mendalam menelusuri implikasi jangka panjang praktik brokerage Botoh terhadap kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan pasca kemenangan. Fokus penelitian masih berada pada fase pemenangan elektoral, sehingga dinamika relasi antara Botoh dan kandidat setelah pasca kemenangan dan Ketika kandidat menjabat belum tergali secara sistematis.

4.3.2 Saran Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian ke depan dapat memperluas cakupan wilayah dengan menggunakan pendekatan komparatif antar daerah. Perbandingan praktik Botoh di wilayah dengan karakteristik sosial dan politik yang berbeda akan membantu memperkaya pemahaman mengenai variasi pola brokerage politik di Indonesia.

Kedua, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan perspektif pemilih secara lebih langsung. Pendekatan ini dapat memberikan gambaran yang lebih seimbang mengenai bagaimana pemilih memaknai praktik *vote buying*, bagaimana rasionalitas mereka dibentuk oleh kondisi sosial-ekonomi dan jaringan sosial, serta sejauh mana praktik tersebut memengaruhi kepercayaan terhadap demokrasi lokal.

Ketiga, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada fase pasca kemenangan elektoral, khususnya untuk mengkaji bagaimana relasi antara Botoh dan kandidat berkembang setelah kandidat menjabat. Kajian semacam ini penting untuk memahami dampak jangka panjang brokerage politik terhadap kebijakan publik, distribusi sumber daya, dan kualitas pemerintahan daerah.

Keempat, penggunaan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) juga dapat dipertimbangkan. Pendekatan kuantitatif, seperti survei pemilih atau analisis data pemilu, dapat melengkapi temuan kualitatif dan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pola dan skala praktik *vote buying* yang dimediasi oleh Botoh.

Saran-saran tersebut tidak dimaksudkan untuk menutup kemungkinan pendekatan lain, melainkan sebagai penanda bahwa praktik *vote buying* dan peran Botoh merupakan fenomena kompleks yang masih membuka banyak ruang kajian. Dengan memperluas perspektif dan metode, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai dinamika politik lokal dan tantangan penguatan demokrasi di tingkat daerah.